KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Panitia angket terus berupaya libatkan Polri
Tanggal : Kamis, 05 Oktober 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

DPR

Panitia Angket Terus Berupaya Libatkan Polri

JAKARTA, KOMPAS – Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi terus berupaya agar Kepolisian Negara RI mau memenuhi permintaannya jika ingin memanggil paksa pimpinan KPK untuk hadir di hadapan panitia angket.

"Intinya, kata Kapolri, kalau memang DPR menghendaki (pemanggilan paksa terhadap KPK), Kapolri akan mempertimbangkannya," kata anggota Panitia Angket dari Fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Rabu (4/10).

Pernyataan itu disampaikan Bambang setelah kemarin panitia angket bertemu dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Markas Besar Polri, Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup selama sekitar 2,5 jam.

Dalam pertemuan itu, Tito didampingi Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Syafruddin dan Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Putut Eko Bayuseno.

Adapun rombongan panitia angket berjumlah 11 orang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Ketua Panitia Angket dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa.

Namun, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto membantah jika pertemuan itu membahas kemungkinan pemanggilan paksa pimpinan KPK oleh Polri. "Tidak ada. Itu tidak masuk substansi yang disampaikan," ujarnya.

Dia juga membantah pertemuan itu membahas kemungkinan panitia angket meminta keterangan sejumlah penyidik kepolisian yang pernah bertugas di KPK.

"Sifat pertemuan itu hanya konsultasi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, Juli lalu. Namun, materi (konsultasi) tertutup sehingga tidak bisa saya sampaikan," kata Setyo Wasisto.

Sebelumnya, Jenderal (Pol) Tito Karnavian juga membantah akan membantu panitia angket untuk memanggil paksa pimpinan KPK. Pernyataan itu disampaikan karena panitia angket mengaku telah menerima restu dari Polri untuk memanggil paksa KPK (*Kompas*, 3/10).

Penyelidikan

Menurut Bambang, saat ini panitia angket belum sampai pada keputusan akan meminta bantuan kepolisian untuk memanggil paksa pimpinan KPK.

Saat ini, panitia angket masih mencari fakta-fakta yang menunjukkan KPK tidak menjalankan kewenangannya dengan baik. Sebagai contoh, kemarin, ada tiga tim beranggotakan panitia angket berangkat ke Sumatera Utara, Riau, dan Jawa Timur. Namun, dia enggan membeberkan agenda mereka. Panitia angket juga berencana mendengarkan keterangan penyidik polisi yang pernah bertugas di KPK.

"Semuanya operasi rahasia, tidak perlu terbuka, penyelidikan kami dimungkinkan untuk dilakukan secara tertutup," ujar Bambang.

Setelah fakta-fakta yang diperoleh dinilai cukup, barulah panitia akan memanggil kembali KPK. Namun, prosedur pemanggilan tetap mengikuti Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

"Akan ada panggilan kedua untuk KPK. Jika tidak hadir, ada panggilan ketiga. Baru jika tidak hadir juga, kami akan bahas apakah untuk memanggil paksa KPK," katanya. (SAN/APA)